Volume 2, Nomor 1, Januari 2015 ISSN 2356-4350

JURNAL WITARADYA

Pembina
H. Suhajar Diantoro

Penasehat
Ermaya Suradinata
Sadu Wasistiono
Wirman Syafri

Penanggungjawab
Khasan Effendy

Pimpinan Redaksi
Aries Djaenuri
Bambang Supriyadi

Anggota Redaksi
Hasan Ahmad
A. Masrich
Mulyadi
Gede Bhayu Dananjaya
Sri Sundari
Djuhairiyah
Maria Ekowati
Romi Saputra
Hasbullah

Staf Redaksi
Triyanto
Dede Saidah
Deded Mulyana
Dudi Wiguna
Neneng Juariyah

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang terhormat, dalam kesempatan ini *Jurnal Witaradya* diterbitkan dengan tema pokok pemerintahan, baik mencakup konsep maupun berbagai hasil penelitian. Konsep dan hasil penelitian merupakan pengembangan dan pendalaman dari berbagai studi yang diuji secara khusus dan mendalam di bidang manajemen pemerintahan.

Harapannya adalah materi yang disajikan dalam Jurnal ini dapat bermanfaat guna menambah wawasan informasi dan pengetahuan, bagi ilmuan, praktisi, dan pecinta kajian ilmu pemerintahan. Selamat membaca, dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan.

Salam,

Redaksi,

REDAKSI

Jurnal Witaradya

Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Jl. Raya Ir. Soekarno Km. 20 Telp/Fax: (022) 7781576 Sumedang Jawa Barat 45363
e-mail: jurnalwitaradya@pps.ipdn.ac.id

Volume 2, Nomor 1, Januari 2015 ISSN 2356-4350

JURNAL WITARADYA

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi i

Daftar Isi iii

- **Yuswandi A. Temenggung**
  Perkembangan Esensi Perencanaan Pembangunan Indonesia dan Jepang ..... 1 – 14
- **David Mathias Yamonaha Hulu**
  Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam Mewujudkan Kota "Samaeri" (Studi di Pemerintah Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara) ..... 15 – 25
- **Afni Safitri**
  Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) ..... 27 – 45
- **Anwar Basri Selang**
  Pengembangan Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate ..... 47 – 56
- **Bastian Telaumbanua**
  Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli) ..... 57 – 62
- **Bob Woriori**
  Evaluasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dari Bupati kepada Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen Provinsi Papua ..... 63 – 70
- **Deslawati Zega**
  Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Gunungsitoli ..... 71 – 80
- **Eko Ary Yanto Tello Zebua**
  Strategi Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah

PERKEMBANGAN ESENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DAN JEPANG

Oleh: Yuswandi A. Temenggung

ABSTRAK: Perencanaan merupakan proses kegiatan yang terstruktur dan sistematik dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi semakin tinggi kesiapan perencanaan dalam kegiatan cenderung semakin akses berbagai demensi. Proses menuju output kegiatan pada kerja perencanaan dengan dua pendekatan, *Pertama*: Top Down yaitu strategi yang terukur dan sistematik diramu dan dilakukan oleh pemerintah ada lembaga pusat. *Kedua*: Botom Up yaitu pola dan strategi yang dihimpun dan di akses dari bawah atau dari berbagai cita-cita dan harapan masyarakat.

Rancang bangun bahan dan material dikelola dan diakses ke atas untuk kepentingan luas dan generalis dengan pola Top Down and Botom Up merupakan model atau pola yang terukur dan sistematik untuk mengawal kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Perlu diusut bahwa tujuan organisasi dengan tujuan individu atau anggotanya dilakukan secara berimpit artinya keberhasilan organisasi berimbas pada keberhasilan lain dan kesejahteraan anggotanya. Model Top Down dan Button Up tersebut prinsipnya semua mengawal kegiatan *pra-proses* dan *pasca*-kegiatan yang secara linier setiap kegiatan cenderung ada masalah dan setiap masalah diberikan solusi sejalan dengan dinamika kegiatan dan masalah pada pra- selesaikan pada area dan medan tersebut, demikian juga proses termasuk pasca kegiatan yang secara prinsip dilakukan secara menyeluruh kendala dan upaya yang dilakukan secara integral dengan pola pengembangan perencanaan baik pemerintah Indonesia maupun Jepang.

Kata Kunci: perencanaan, sistematik, pemerintah, Indonesia, Jepang

ABSTRACT: Planning is a process that tersetruktur and systematic activity in individuals and organizations achieve higher readiness planning activities tend to increasingly access a variety of dimensions. The process towards the output of activities in the work plan with the two approaches, First: Top Down is measured and systematic strategy formulated and carried out by the government is no central agency. Second: Botom Up namely patterns and strategies collected and accessed from below or from the various ideals and expectations of society.

The design of materials and material are managed and accessed up to generalist with broad interests and patterns of Top Down and Botom Up is a model or pattern that is measurable and systematic to oversee activities in accordance with the objectives of the organization. Needs to be investigated that the goals of the organization with the purpose of individuals or members performed coincides impact on organizational success means another success and welfare of its members. Models Top Down and Button Up is principle all escort activities of pre-process and post-activities linearly each activity are likely to have problems and each problem is given a solution in line with the dynamics of the activities and problems in pre-finish on the area and the terrain, as well as the process including post prinsif activities are carried out thoroughly constraints and efforts made integrally with the pattern of development planning Indonesian government and Japan.

Key Words: *planning, systematic, government, Indonesian, Japan*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan Indonesia mengalami pluktuatif sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan di era orde lama perencanaan pembangunan berorientasi membangun kesatuan dan persatuan dalam menjaga negara berdaulat.

Kondisi tersebut di implementasi dalam bentuk sistem *presidentil – parlementer* yang memberi warna dalam menjalankan

sistem pemerintahan dan pembangunan. Di era pemerintahan orde baru perencanaan pembangunan dilakukan secara priodik lima tahun.

Sementara dalam era reformasi perencanaan pembangunan Inklude termuat dalam visi misi presiden dengan tetap mengacu pada UUD'45 dan Pancasila dengan titik utama penjabaran sesuai harapan dan dinamika masyarakat. Lihat fakta empiris dalam kasus pembangunan imfra struktur dan sufra struktur.

Tahun 2005 hingga tahun 2025 Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari:

1. RPJM Nasional I Tahun 2005–2009,
2. RPJM Nasional II Tahun 2010–2014,
3. RPJM Nasional III Tahun 2015–2019,
4. RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Pola dan proses jalan tol berjalan secara sustanable dari presiden Habibi, Abdurahman Wahid, Megawati, Bambang Yudoyono dan saat ini Jokowidodo. Pola pembangunan bersumber dari APBN dan Investor lokal maupun Asing yang dikelola. Yang menjadi Target Jalan Tol di Sumatera seluas 800 Km Salah satu ruas jalan lintas Sumatera.

Jakarta, baranews.co Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer pada periode 2015-2019. Target itu disebutkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto, jalan tol sepanjang itu terdiri dari 800 kilometer (km) di Sumatera dan 200 km di Jawa dan Indonesia bagian timur.

Djoko mengemukakan hal itu seusai penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 kilometer (km) itu merupakan salah satu ruas jalan tol di Sumatera. Pembangunannya dibagi menjadi dua seksi. Seksi I meliputi daerah Tanjung MorawaPerbarakan (Deli Serdang)-Kualanamu (Deli Serdang) sepanjang 17,80 kilometer. Adapun seksi II meliputi Lubuk Pakam (Deli Serdang)-Tebing Tinggi.

Proyek tersebut dikerjakan konsorsium PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan biaya investasi Rp 4,1 triliun. "Saat ini, pembebasan lahan mencapai 83 persen. Saya berharap untuk seksi I bisa selesai pada 2016 dan seksi II selesai pada 2017," ujar Djoko.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol A Gani Ghazali mengatakan, pembangunan jalan tol di Sumatera itu juga mendukung rancangan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Jalan tol yang membujur mulai dari Aceh hingga Lampung itu panjangnya 2.771 km yang dibagi menjadi 23 ruas. Menurut rencana, pembangunannya dilakukan secara bertahap hingga 2025.

Pengerjaan dimulai di empat ruas, yakni Pekanbaru-Dumai (135 km), Indralaya-Palembang (22 km), Medan-Binjai (15,8 km), dan Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km). Di Jawa, tambah Gani, proyek jalan tol antara lain Semarang-Solo (50 km), Solo-Ngawi (90 km), dan Ngawi-Kertosono (87 km). Adapun di Indonesia bagian timur meliputi Tol Kalimantan-Samarinda (99 km) dan Manado-Bitung (41 km).

Direktur Utama PT Jasa Marga Adhityawarman menyatakan siap berperan dalam proyek pembangunan jalan tol yang ditargetkan pemerintah itu. PT Jasa Marga, kata Adhityawarman, saat ini sedang menggarap proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan Surabaya-Mojokerto. (Sumber: *Jakarta, baranews.co)*

IKTISAR (PROYEK PEMBANGUNAN PLAZA PERAIRAN) DAM I OKASHIGAWA

1. Iktisar Dam I Oksashigawa

Penanggulangan banjir terpadu di aliran sungai mamagawa Yang dimaksud penanggulangan terpadu adalah penanggulangan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap bencana banjir yang meliputi seluruh aliran sungai, mempertahankan fungsi daerah disekitar sungai sebagai sumber air dan sebagai tempat permainan air, selain pembangunan, pemeliharaan dan renopasi daerah aliran sungai, fasilitas jalan dan dam.

Prefektur Chiba, sungai mamagawa ditunjuk oleh kementerian kontruksi sebagai sungai khusus penanggulangan banjir terpadu sejak tahun 1979. Kemudian pada tahun 1980 dibentuk dewan kerjasama penanggulangan terpadu daerah aliran sungai mamagawa yang meliputi 4 kota (Kota Ichikawa, Kota Matsudo, Kota Kamagaya dan Kota Funabashi), dengan tujuan untuk tempat membicarakan secara harmonis dan berkelanjutan tentang penanganan banjir secara terpadu.

Penanggulangan banjir terpadu daerah aliran mamagawa bertujuan utama untuk menyediakan sarana yang dapat mengantisipasi curah hujuan 50 mm/jam, membangun Dam dan tempat penampungan air di sekolah-sekolah di kota Ichikawa, serta penyediaan regulasi bantuan kepada bangunan yang terendam air hujan.

2. Dam I (pertama) Okashigawa

Prefektur Chiba merencanakan sebuah proyek penanggulangan banjir terpadu secara berkelanjutan, dengan pembuatan Dam untuk mengatur debet air kota Okshigawa di ujung daerah *Bokke-cho* blok 4, yang merupakan permainan air yang aliran sedang, dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana banjir di daerah hilir sungai mamagawa.

Rencana pembangunan Dam I Okshigawa ini meliputi daerah 16 ha, tempat penampungan air sebesar 254.000 m^3 yang dapat menampung curah hujan 50 mm/jam. Sejak 1979 proyek dapat berjalan lancar berkat pemahaman dan kerja sama para pemilik tanah yang dijadikan tempat proyek tersebut.

Bagi kota Ichikawa sendiri dari Dam Okshigawa bukan hanya mendapatkan manpaat dari sisi banjir saja, tetapi sejak tahun anggaran 1994 juga mendapatkan dorongan untuk melakukan pemikiran yang berkelanjutan tentang bagaimana seharusnya menyusuaian pembangunan Dam dalam program pembangunan kota. Proyek Dam Okashigawa yang dimulai tahun anggaran 1994 merupakan *open space* (ruang terbuka) yang sangat penting untuk penghijauan dan penjagaan kelembaban kota. Berdasarkan penandatanganan persetujuan proposal pembangunan ber"pola kreasi lingkungan alam" yang diajukan oleh prefektur chiba, kota Ichikawa mengajukan proposal permohonan pengerjaan proyek tersebut ke prefektur Chiba di tahun anggaran 1994, selain itu juga memuat artikel-artikel tentang pembangunan dan Okashigawa berpola kreasi lingkungan alam di lembar bulanan berita kota "Kouhou Ichikawa"

Kementerian transportasi dan pertanahan nasional membuat "proyek pembangunan plaza perairan" sejak tahun anggaran 1996 dengan tujuan untuk menumbuhkan ide "perairan yang meriah" sebagai daaerah pusat utama melalui pembangunan di daerah perairan di kampung, desa dan kota untuk memaksimalkan daya tarik tersebut.

Setelah menerima propasal ini, dengan nama gabungan kota Ichigawa dan prekfetur Chiba, kota Ichigawa pada tahun anggaran 1996 mengajukan pendaftaran, dan pada tahun anggaran 1997 menerima pemberitahuan persetujuan proyek yang ditunjuk oleh kementerian kontruksi.

Kemudian pada tahun anggaran 1998, kota Ichigawa menetapkan "surat persetujuan" atas poin-poin dasar rencana proyek pembangunan plaza perairan bersama prefektur Chiba.

Fenomena ditunjuknya kota Ichigawa dan prefektur Chiba sebagai pelaksana proyek pembangunan plaza perairan, pembangunan Dam Okashigawa yang semula bertujuan sekedar untuk penanggulangan banjir saja, meluas menjadi prasarana berpola lingkungan alam yang ramah lingkungan air. Pelaksanaan proyek dilakukan secara bersama-sama oleh prefektur Chiba dan kota Ichigawa, dengan tugas masing-masing adalah daerah lokal (kota Ichigawa) sebagai pelaku utama pembangunan daerah utama disekitar Dam, sedangkan otoritas manajemen sungai (prefektur Chiba) adalah bertugas menyeleraskan pembangunan sungai-sungai seperlunya sesuai dengan prioritas, sesuai dengan kemajuan pembangunan dasar yang dilakukan oleh kampung, desa dan kota.

Kemudian tahun anggaran 2000 pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk menetapkan rancangan dasar pembangunan, oprasional dan manajemen setelah selesai pembangunan, yang dilakukan melalui workshop yang melibatkan partisipasi masyarakat. Bina Marga sebagai kepanjangan pemerintah demikian juga dengan kasus-kasus pembangunan lainnya baik non fisik maupun fisik termasuk Inprastruktur gedung, sarana umum, teknologi pertanian dan seterusnya. Demikian hal nya dengan pemerintah jepang melakukan pembangunan Inpra dan supra strukturnya dikelola secara nasional dalam membangun bangsa jepang dalam sistem sustanable dan berbasis kebutuhan negara dan rakyat. Lihat pembangunan Melalui kerangka dasar tersebut bahwa peneliti mengungkap konsep dasar tentang perencanaan secara strategis pembangunan nasional baik pada pemerintah Indonesia maupun pemerintah jepang.

ESENSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

Esensi perencanaan berarti penyusunan rencana berupa konsep, cerita, uraian dst atau pembuat rencana yang berarti merencanakan, rancangan, perencanaan, proses, pembuatan, merencanakan akan dicapai pertumbuhan yang efisien dan teratur. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perencanaan menegaskan beberapa konsep yaitu proses yang terukur yang sistematik yang mengarah pada output yang jelas dalam pencapaian tujuan di bawah ini dijelaskan beberapa pandangan tentang perencanaan:

1. Nawawi (2010:29-32) perencanaan adalah:
   a. Proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.
   b. Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang melakukannya.
   c. Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang merumuskan dan menetapkan keputusan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan secara terarah pada suatu tujuan.
2. Menurut Kay dan Alder dalam Rustiadi (2011:335) Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
3. Sumodiningrat (1999:2) menyebut pentingnya peran perancanaan di dalam pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan jalan untuk mewujudkan aspirasi tuntutan masyarakat, diberbagai negara yang sedang berkembang, dengan keterbatasan sumberdaya ekonomi dana prasarana, perencanaan pembangunan diyakini sebagai suatu cara yang paling efektip yang efisien untuk menetapkan arah pembangunan.
4. Salusu dalam Salam (2007:155) pentingnya Perencanaan Strategis bagi pemerintah daerah karena disanalah terlihat dengan jelas pelayanan pimpinan daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerja. Perencanaan strategis akan membantu menentukan arah masa depan daerahnya, Kecamatannya, Desa dan Kelurahannya. Dengan melaksanakan rencana strateghis yang tepat, para eksekutif daerah dapat lebih meningkatkan kemampusn pejabat-pejabatnya dalam mengevaluasi, memilih,

dan mengimplementasikan berbagai kegiatan yang perlu dibiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Tarigan (2005:21), perencanaan dalam pengertian sederhana, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

   Tarigan juga melihat perencanaan dengan dipergunakan paktor internal dan juga eksternal (2005:3) perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini meramalkan perkembangan berbagai paktor Noncontrollable yang relevan memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkann tujuan dan saran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

   Menurut Winardi (2000:230) Perencanaan merupakan landasan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya lebih jauh dikatakan, perencanaan merupakan sebuah fungsi manajemen yang fundamental serta primer. Yang merupakan landasan untuk pelaksanan tugas seorang menejer.

6. Menurut Pratiwi dkk (2011:438) bahwa: Musrembang merupakan media penting warga untuk menyalurkan aspirasi ketika pemerintah menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) juga merupakan sarana pemerintah memperoleh masukan untuk membuat investasi pembangunan kota secara menyeluruh.

7. Rumusan kalimahnya khususnya Pasal 63 sebagai berikut:

   Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembanguanan daerah kabupaten/kota. Ayat (2) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Dersa, (Pasal 63 ayat. 1, 2, 3, PP 72/2005).

8. Lincolin dkk (2011:24-25) menegaskan bahwa; Sebagai bagian dari penyelenggaraan desa, desa diwajibkan untuk memiliki perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

9. Makmur (2013:253) menyatakan, kegagalan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena para pelaku dalam bidang pembangunan dalam melaksanakan serangkaian tindakan senantiasa terjadi ketidakselaraskan, ketidaksesuaian, kontradiksi antara pelaku pembanguan itu sendiri dengan pengguna hasil-hasil pembangunan.

10. Nitisastro (2010:10) bahwa;

    Perencanaan pembangunan itu berkisar pada dua hal, yakni : *pertama*, penentuan pilihan secara sadar mengenai berbagai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien, serta rasional guna mencapai berbagai tujuan tersebut.

11. *According to Conyers (1984: 5) Definition of development planning can be seen from several aspects. From the aspect of activity states that "planning involves matters relating to decisions or choices regarding how to utilize existing resources as much as possible in order to achieve certain goals or facts that no future".*

12. *Mayer (1985: 16) adds that the plan is closely related to policy-making (policy making). In fact, the two are often interchangeable. According to Mayer of the difference is due to the historical development of literature and not in the meaning attached to the term. James E Anderson (1978: 3) says that the policy is "a purposive course of action Followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern".*

    Chronology of Regional Planning According to Mayer (1985: 104), for a planning model that

rasional of 9 (nine) steps are presented in the following figure:

Gambar 1
Flow Of Rational Planning **Process In Stages**

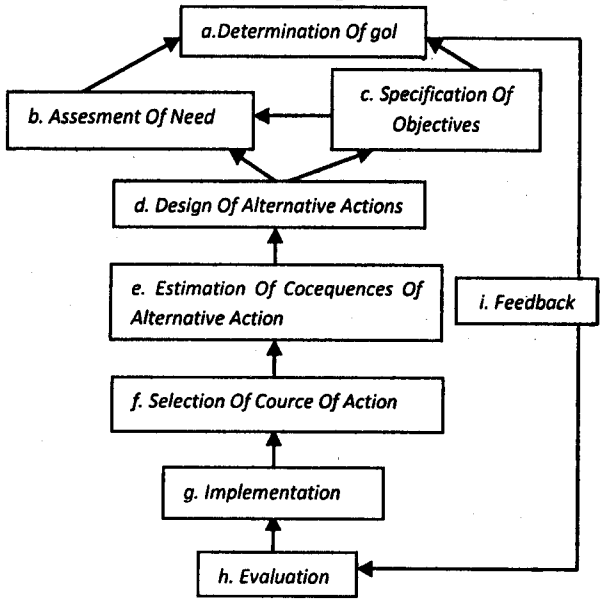

Sumber: Policy and Progam Planing, Robert Mayer 1985.

Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut. Partisipasi diartikan oleh World Bank (1996) sebagai "a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decision and resources which affect them". (dalam Brinkerhoff, 2002:53).

13. Pembangunan yang bersifat partisipatif menuntut masing-masing aktor untuk berinteraksi dengan membentuk pola kemitraan seperti disampaikan oleh Rudqvist and Woodford (1994) bahwa :

"*Participatory development stands for a partnership which is build upon thebasis of a dialoque among the various actors (stakeholders), during which the'agenda' is set jointly, and local views and indigeous knowledge aredeliberately sought and respected. This implies negotiation rather than thedominance of an externally set project agenda*" (dalam Cornwall, 2000: 36).

Pemahaman di atas Penulis berpendapat bahwa: Perencanaan pembangunan merupakan chois atau pilihan bagi pengambil kebijakan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sumber daya alami, infra struktur, sub sumber dana dan peluang serta tantangan kesejahteraan bagi perkembangan masyarakat dalam bingkai negara.

METODE KAJIAN

Metode kajian penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi koperatif, studi kepustakaan yaitu upaya menganalis data dengan menggunakan pendekatan dan bobot leteratur yang sejalan dengan tofik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan (Roth 1986).

Studi kajian dalam kontek perbandingan perencanaan pembangunan nasional indonesia dengan jepang yaitu menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan esensi perencanaan pembangunan kedua negara. Hal ini sejalan dengan Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif merupakan sejenis penelitian

deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

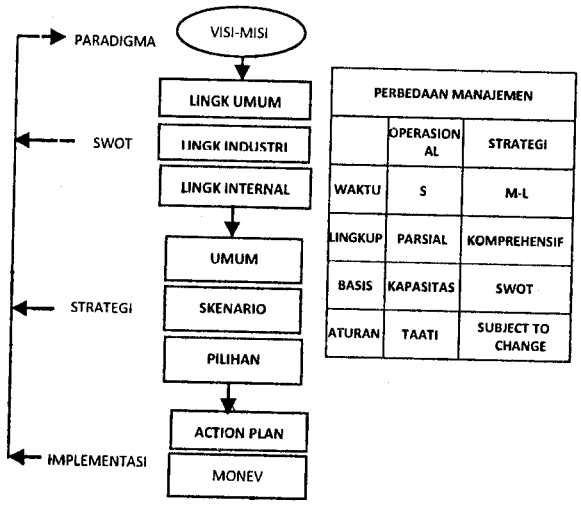

PERBEDAAN MANAJEMEN		
	OPERASIONAL	STRATEGI
WAKTU	S	M-L
LINGKUP	PARSIAL	KOMPREHENSIF
BASIS	KAPASITAS	SWOT
ATURAN	TAATI	SUBJECT TO CHANGE

Gambar 2. Manajemen Strategis

PERKEMBANGAN ESENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA DAN JEPANG

1. Esensi Perencanaan Pembangunan Indonesia

Bahwa di dalam konteks penyelenggaraan negara secara berkesinambungan, penyusunan rencana pembangunan haruslah berbasis kajian atas pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya dan artikulasi dari apa yang seharusnya tercapai di dalam periode pelaksanaannya. Dalam hal penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, terdapat kelemahan umum berupa kesenjangan antara perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan rencana sebagai berikut:

a. Proses perencanaan pembangunan tidak sekaligus mengembangkan indikator kinerja dan target terukur; masalah ini sangat umum terjadi karena kebanyakan rencana pembangunan (termasuk perencana) tidak sampai mendefinisikan bagaimana rencana bisa dicapai atau diwujudkan. Pada umumnya rencana pembangunan berhenti pada identifikasi (apa, mengapa, di mana, kapan, dan berapa anggarannya).
   1. Rencana-rencana yang disusun tidak dikaitkan dengan *scorecard* kinerja organisasi dan individu; hampir tidak mungkin menemukan hubungan yang mengikat antara keberadaan sebuah organisasi/ individu aparat pemerintah dengan kualitas bagian/ penjabaran rencana pembangunan yang dihasilkannya.

   2. Tidak efektifnya mekanisme untuk pemantauan kinerja organisasi dan pelaporan; masalah ini terutama sebagai akibat tidak ditetapkannya tolok ukur yang mengikat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan pemuatannya di dalam dokumen rencana. Dalam hal ini budaya subyektif menjadi sangat kental, dan budaya obyektif cenderung punah. Penilian di atas bersama-sama dengan isu-isu lain yang berhubungan dengan manajemen strategis. Sumber : *makmur 2013, dalam manajemen strategi*

Selanjutnya digunakan sebagai basis untuk menyimpulkan sasaran dan prinsip-prinsip sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

a. Memperkuat kooperasi/kemitraan antara politikus, masyarakat, pakar, dan aparat pemerintah pusat/daerah dalam satu rangkaian proses politik, proses teknokatik, proses partisipatif, dan proses *bottom-up & top-down*. Tradisi perencanaan ini dikenal sebagai tradisi Analisis Kebijakan.

b. Merangkai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hubungan kesinambungan antar dimensi materi, ruang dan waktu yang nyata (Lihat Gambar 2 dan Gambar 3).

c. Memastikan bahwa perencanaan pembangunan terpadu ini searah dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas politik; bahwa pelaksanaan rencana pembangunan (daerah) tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan/kewenangan kepemimpinan penyelanggaraannya yang lahir dari

proses politik. Dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah, proses politik1 masuk sebagai bagian awal proses perencanaan.

d. Mengembangkan kesatuan antara proses-proses perencanaan, pengelolaan kinerja, dan penganggaran; prinsip dasarnya adalah membiayai keluaran bukan membiayai kegiatan atau proyek.

e. Memastikan pengembangan program-program, proyek-proyek, aktivitasaktivitas, dan target-target untuk mencapai strategi (rencana) pembangunan daerah; prinsip hubungan struktural dan organik batang – cabang – ranting.

f. Memperkuat keterkaitan dan keterpaduan penyediaan pelayanan ke seluruh wilayah berdasarkan pendekatan sektor, kewilayahan dan kelembagaan.

g. Memberdayakan dan membudayakan pelaporan pertanggungjawaban kinerja dan keberhasilan secara jelas/eksplisit dan terukur, menuju obyektivitas dan meninggalkan subyektivitas yang sejalan dengan meningkatkan kredibilitas komunikasi perencanaan.

h. Memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah mewujudkan basis dari sistem pengelolaan kinerja organisasi dan individu; rencana jangka menengah memuat rancangan yang nyata, bukan lagi indikatif.

i. Membangun komitmen pada para pengelola organisasi (khususnya non pemerintah) dengan rasa turut memiliki strategi (rencana) pembangunan daerah dan pelaksanaannya; sebagian besar sumberdaya untuk pembangunan berada pada masyarakat dan organisasi non pemerintah. Komitmen terbangun dengan komunikasi perencanaan yang eksplisit.

j. Memperkenalkan struktur dan konsistensi tentang proses perencanaan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah;

Modal dasar untuk mengembangkan rasa memiliki dan pemantapan komitmen bersama. Sasaran-sasaran di atas bersama-sama dengan pengujian *benchmarking*, dimanfaatkan sebagai basis untuk menemu-kenali pendekatan dan sistem yang cocok untuk perencanaan pembangunan. Dari sini, pada tahun 1992, Robert S. Kaplan dan David Norton, mensintesiskan metoda perencanaan pembangunan dengan *Balanced Scorecard.*

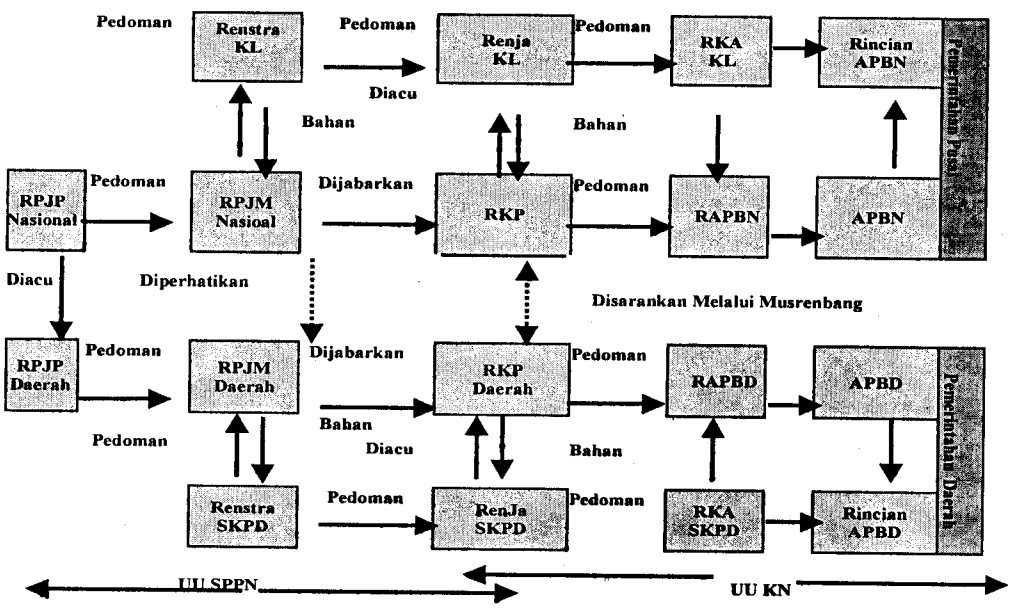

Gambar 3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran (UU 25/2004)
Sumber: *Undang-undang No. 25 tahun 2004*

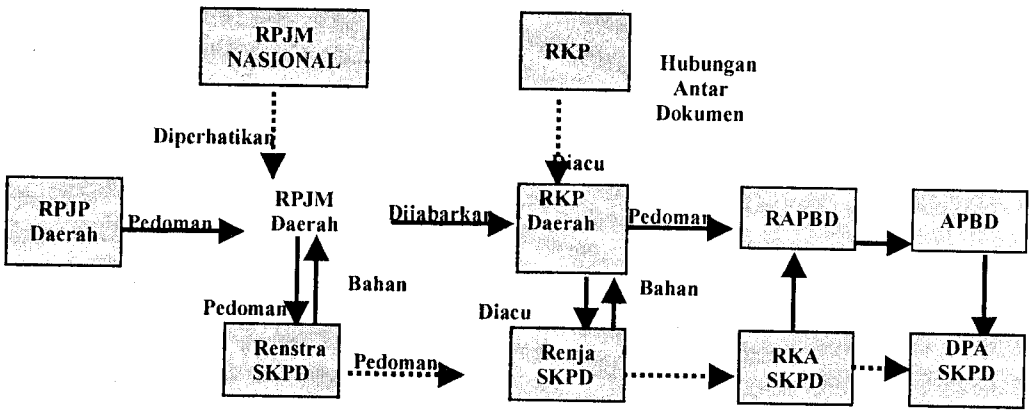

Gambar 4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Sumber : *Undang-undang No. 25 tahun 2004*

Jenjang Perencanaan

Jenjang pemerintahan	Jumlah	Perencanaan
Pemerintahan pusat	1	Komperhensif rencana pembangunan nasional
Regional tidak ada pemerintahan	8	Rencana pembangunan regional
Pemerintahan prefektural	47	Rencana komperhensif prefektural
Pemerintahan lokal	Kurang lebih 3200	Rencana komprehensif lokal Rencana kota

Perencanaan Wilayah Luas Dua Arah:

1. Arah Top Down
   a. Penggunaan tanah dan sumber alam secara efisien
   b. Distribusi yang seimbang antara industri dan fasilitas
   c. Keamanan nasional
2. Arah Botom Up
   a. Mengelola pemekaran kota
   b. Penggunaan tanah secara seimbang dengan melestarikan wilayah pertanian dan hijau

Perencanaan Nasional dan Regional, Alur Top Down:

1. Kekuasaan terpusat menciptakan administrasi yang bersifat Top Down
   a. Negara-negara sosialis
   b. Jepang dan Perancis merupakan contoh tifikal dari negara kapitalis
   c. Tidak ada perencanaan Nasioanal di Amerika Serikat dan Inggris
2. Efektip dalam proses pembangunan ekonomi negara
   a. Pemerintah dan industri mengarah pada tujuan yang sama
   b. Administrasi publik dan keungan memegang peranan penting

Perencanaan Regional, Alur Botom Up

1. Banyak kota besar menghadapi tekanan yang meningkat di awal abad ke 20:
   a. IFHP diusulkan untuk mengkontrol ekspansi kota dan mengembangkan kota-kota baru di daerah jauh pinggir kota
   b. Ukuran kota optimal di angkat untuk diskusi
   c. E. Howard menunjukkan suatu solusi untuk london yakni dengan mengembangkan kota baru pertama, Letchworth
2. Perencanaan regional berupa untuk pembangunan terencana kota-kota metropolitan:
   a. Pengaturan terencana infrastruktur
   b. Pembangunan terencana Sub-center

2. Perencanaan Nasional

Perencanaan Nasional adalah perencanaan yang dibuat pemerintah pusat terhadap

pembangunan, tata guna dan pelestarian lahan seluruh negara. Karena untuk merealisir rencana itu dibutuhkan kemampuan pelaksanan proyek dari pemerintah pusat, dan kekuasaan untuk memberikan perintah kepada pemerintah daerah dibawahnya, maka perencanaan nasional memiliki target yang bersifat nasional. Perencanaan nasioanal ini juga dapat disebut sebagai sitem perncanaan inheren yang mempersyaratkan kekuasaan pemerintahan pusat yang kuat. Di jepang, setelah perang usai selama lima tahapan disusun dan dilaksanakan perencanaan pembangunan komprehensif seluruh negara dimana upaya inilah yang menunjang restorasi jepang pasca perang dan pertumbuhan ekonomi jepang yang pesat. Di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti Korea Selatan, Taiwan, dan di negara-negara sedang berkembang di Asia, juga disusun perencanaan nasional. Sebaliknya di Amerika Serikat dan Eropa, sekarang ini pada umumnya tidak ada perencanaan nasional. Lebih jauh lagi, di Jerman perencanaan disusun di bawah pedoman yang menekankan pengelolaan pelestarian lingkungan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perencanaan yang berorientasi pada pembangunan.

Di Jepang, Rencana Pembangunan Komprehensif Seluruh Jepang (Rencana Nasional) telah disusun sejak pasca perang dari tahap I sampai tahap V. Semenjak masa restorasi pembangunan pasca perang dunia II, masa pertumbuhan ekonomi yang pesat, sampai sekarang ini, persoalan pemusatan penduduk dan pertumbuhan industri di kota-kota besar terutama Tokyo terus menerus telah menjadi topik problem utama yang muncul rencana nasional. Pada rencana nasional tersebut dibahas juga penyebaran industri dan populasi serta koreksi perbedaan tingkat hidup antar wilayah. Oleh sebab itu, tahap I (1962) mengarah pada penyebaran pembangunan kota-kota industri baru sebagai lokasi pertumbuhan industri di daerah-daerah, tahap II (1969) meluncurkan rencana besar sejalan gelombang pertumbuhan ekonomi yang pesat saat itu, yakni dengan tema industri, peternakan, rekreasi dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1970 dengan adanya Nixon Shock (pengaruhnya kepembatasan fluktuasi nilai tukar yen), Oil Shock dan faktor-faktor lain, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, dan masuk kemasa pertumhan stabil. Sebagai akibatnya, apa-apa yang direncanakan pada tahap II ternyata prediksinya berlebihan dari permintaan yang kenyataanya ada. Oleh sebab itu, tanpa perdebatan yang panjang, isi perencanaan tersebut ada yang dikoreksi dan ada yang dihentikan. Di pihak lain, timbul juga kritik terhadap stimulan pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah-daerah pinggiran kota besar sehingga penekanan rencana di alihkan kepeningkatan kualitas hidup wilayah-wilayah tersebut. Pada tahap III (1977) diluncurkan gagasan populasi konstan, dan dilakukan pematangan kota-kota di daerah agar memiliki fungsi-fungsi memadai seperti transportasi, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Pada tahap IV yang disusun pada tahun 1987 di bawah kondisi gelembung, disuarakan pembentukan negara dengan penyebaran di banyak kutub, dan ini di lanjutkan pada tahap V tahun 1998.

Rencana Nasional disebutkan menjadi salah satu pendorong utama restorasi pembangunan pemulihan pasca perang dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang. Dengan kata lain disebutkan bahwa ada kecendrungan pemusatan pertumbuhan pembangunan wilayah di kota-kota disisi Samudra Pasifik, yang merupan konsekuensi teori pengembangan wilayah negara seperti yang sanmpai saat itu yaring disuarakan. Namun dengan semakin mengecilnya disparitas antar wilayah, masyarakat dengan populasi yang semakin mengecil, sedikit anak banyak manula, semakin menguatnya pendapat umum yang mengatakan lebih penting keamanan dan keselamatan di bandingkan pertumbuhan pembangunan sderta semakin banyaknya proyek-proyek fasilitas umum besar yang mengabaikan efisiensi, maka semakin kuat pendapat yang mengindikasikan tidak lagi perlu ada rencana nasional yang bersifat akselerasi pembangunan.

Rencana Nasional dikatakan memiliki fungsi untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran dasar pembangunan, tata guna lahan, pembangunan fasilitas / infrastruktur modal sosial, dan proyek-proyek negara. Didalamnya, pertama pada pemikiran dasar pembangunan, orientasi utama pada pembangunan dan pertumbuhan dialihkan menjadi berorientasi keamanan / keselamatan, daur ulang dan sebagainya. Juga pembangunan fasilitas/ infrastruktur modal sosial, sekarang

ini secara drastis sedang dilakukan perombakan terhadap kecenderungan yang ada yakni pengaliran modal yang sangat besar ke sektor kontruksi yang menyebabkan Jepang dijuluki negara raksasa kontruksi pembangunan.

3. Perbandingan Perencanaan Nasional Jepang dengan Indonesia

No	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1	Memiliki perencanaan pembangunan Nasional	Pada awal dimulainya pasca pereng dunia ke II	
		Di mulai sejak kemerdekaan RI 1945 yang tertuang dalam UUD'45	
2	Sama – sama negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahannya, ditingkat pemerintah pusat, adanya keseimbangan kekuasaan (check and balance diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.	Jepang : a. menganut Sistem Pemerintahan Parlementer. b. Pemerintahan daerah tidak terlalu hilarkis yang lebih menekankan pada pembagian fungsi terkait pelayanan pada masyarakat.	Pada dasarnya sama (otonomi daerah). Yangmembedakan-dalam segi kewenangannya
		a. Pemerintah daerah terdiri dari prefektur dan kota. Indonesia : b. Menganut system Pemerintahan Presidentil Masih adanya hubungan hirarkis antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dimana pemerintah provinsi dianggap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.	
2	Memiliki Rencana Nasional	Rencana Nasional Jepang terbagi dalam V tahap	Regional
		Rencana Nasional Indonesia terbagi dalam III periode yaitu Program Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang	Nasional
3	Memiliki orientasi Pembangunan	Jepang: Orientasi awal di bidang Pembangunan fasilitas/Inprastruktur	
		Indonesia: tercantum dalam UUD'45 dan GBHN yang mengedepankan Trilogi pembangunan	
4	Memiliki sistem anggaran; a. penerimaan	Indonesia: a. dari APBN yang di amanatkan dalam UUD'45 pada pasal 33 ruang lingkup keuangan Negara mencakup APBN, APBD, anggaran BUMN/ BUMD, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang hakekatnya seluruh kekayaan negara.. b. pendapatan asli daerah c. dana perimbangan lain-lain pendapatan yang sah	
	b. pengeluaran	a. belanja langsung b. Belanja tidak langsung	
	c. Dana perimbangan pusat dan daerah	a. dana alokasi umum (DAU) b. dana alokasi khusus (DAK) dana bagi hasil	

	c. penerimaan	a. Local transfer tax b. Special local grant c. Local allocation tax d. National treasury disbursements e. Local government borrowings f. Goverment grant	
	d. pengeluaran	a. Gaji pegawai kantor b. Pembiayaan konstruksi bangunan c. Pembiayaan terkait fungsi-fungsi yang di emban prefektur dan kota	
	e. Dana perimbangan pusat dan daerah	a. Berupa local allocation tax yang diberikan secara umum dan khusus b. Berupa share tax yang disebut local transfer tex c. Berupa bantuan pemerintah pusat yang spesifik (grant).	

Sumber: *Perencanaan Pengembangan Pembangunan Jepang, Takashi Onishi, 1998.*

4. Konsep Musrenbangdes

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan kegiatan rutin untuk merencanakan program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Musrenbang dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional. Tujuan dilaksanakannya musrenbang khususnya pada tingkat desa adalah dalam rangka mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat tingkat pedesaan dalam proses perencanaan pembangunan berbasis lokal dengan melihat kondisi dan potensi yang dimiliki. Musrenbangdes merupakan wadah penjaringan aspirasi rakyat dalam bentuk ide atau gagasan dan tawaran program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan.

Menurut Pratiwi dkk (2011:438) bahwa: Musrenbang merupakan media penting warga untuk menyalurkan aspirasi ketika pemerintah menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) juga merupakan sarana pemerintah memperoleh masukan untuk membuat investasi pembangunan kota secara menyeluruh.

Pendapat tersebut sebagai penegasan terhadap substansi musrenbang, yakni, disatu sisi sebagai media partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pedesaan, disisi lain merupakan penyerapan aspirasi masyarakat, dimana terjadi Shering pendapat diantara kedua unsur tersebut. Lebih jauh Pratiwi dkk (201:439), menyatakan bahwa : Kendala utama yang dihadapi selama ini adalah masyarakat tidak memiliki suatu cara atau alat pendukung guna mempermudah perolehan data dan informasi yang akurat, mengolahnya, memetakannya, dan menganalisisnya, serta mengkajinya. Hal ini perlu ditangani untuk mendukung peran serta masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan dalam perencanaan partisipasitif yang merupakan simbol dari bottom up approach agar dapat terlaksana dengan optimal.

Masyarakat seyogianya memiliki suatu cara untuk memahami kondisi dan kebutuhan nyatanya, agar dapat memberikan data dan informasi yang akurat menyangkut program pembangunan desa, untuk kemudian akan dibahas dan dirumuskan dalam musrenbangdes. Dengan demikian paket usulan program pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes, yang akan dilanjutkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten, dapat dipertimbangkan secara objektif dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Pada UU No. 32 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan. Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur lebih rinci tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan. Menyangkut

perencanaan pembangunan desa diatur dalam BAB VI pasal (63,64 dan 65). Khusus yang terkait dengan partisipasi dan pemberdayaan diatur pada pasal 63 ayat (1), (2) dan Dalam rangka penyenggaraan pemerintahan desa disusun perencarman pembangunar desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Dalam penyusunan. perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga Kemasyarakatan desa, (Pasal 63 ayat 1, 2, 3, PP 72/2005).

Menurut Lincolin dkk (2011:24-25), menuliskan bahwa : Sebagai bagian dari penyelenggaraan desa, desa diwajibkan untuk memiliki perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam UU No. 6 tahun 2014, pasal 91 ayat 1 (satu) dinyatakan "Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota". Perencanaan pembangunan desa dimaksud disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) iahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sebagai penjabaran dari RPJM-Desa, untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJM-Desa di bahas bersama Unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representatif masyarakat desa serta menghadirican unsur masyarakat, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Sementara Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJM-Desa) di bahas melalui Musyawarah Perencariaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk setiap tahun, yang melihatkan stake holders, yaitu Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Desa lainnya yang ada di desa serta unsur dimasyarakat.

Berangkat dari berbagai pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat di pahami bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbandes), merupakan media atau sarana penting bagi masyarakat untuk menyalurkan arpirasinya berkaitan dengan perencanaan pembangunan di desanya. Sementara bagi pemerintah menjadi sarana untuk menyerap berbagi aspirasi masyarakat dan memahami perkembangan yang terjadi di desa, yang kemudian menjadi data dan informasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan khususnya. Dengan demikian musrenbang dapat juga sebagai forum masyarakat dan pemerintah dalam membangun pola hubungan untuk membangun komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dan pada tataran konsep musrenbangdes benar-benar merupakan sarana penting bagi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berbasis IokaI.

Menurut Makmur (2013:253) menyatakan, Kegagalan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena para pelaku dalain bidara pembangunan dalam melaksanakan serangkaian tindakan serantiasa terjadi ketidak selarasan, ketidaksesuaian, kontradiksi antara pelaku pembanguran ihu sendiri dengan pengguna basil-basil pembangunan.

Pendapat dimaksud menegaskan bahwa gagalnya pelaksanaan pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat seringkali diakibatkan karena ketidaksesuaian antara program pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Seyogianya pengambil kebijakan lebih berorientasi pads kepentingan banyak orang yang dapat dirujuk pads aspirasi masyarakat, agar program yang ditunankan ke desa dapat bermanfaat bagi warga desa secara langsung. Hal ini tentunya hares didasari adanya suatu perencanaan berdasarkan pendekatan *bottom up.* Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Nitisastro, (2010:10), bahwa:

"Musrenbang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang dari mulai tingkat DesalKelurahan, Kecamatan, Kabupaten (Rakorbang Tk.II), Propinsi (Rakorbang Tk. 1)

sampai ketingkat nasional. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nasional".

KESIMPULAN

Esensi Perencanaan pembangunan Indonesia ada yang berbasis pada landasan, filsafat dan UUD'45 ke semua itu mengandung muatan harapan, keinginan dan cita-cita rakyat dengan kelebihan antara lain *Top Down -Button UP* dengan prinsifnya bahwa perencanaan nasional tetap berdasarkan konstitusi negara dengan perbedaannya. Indonesia dalam pembangunan nasional ada pada kekuatan sumber-sumber dan persedian keuangan negara. Sementara itu di jepang bahwa Perencanaan Nasional Jepang bertolak pada Mix Top Down and Buttom Up dengan tetap berorientasi pada kebutuhan dan prediksi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Lincolin, dan Satriawan Elen dan Mulyo Handoyo Jangkung Fitrady Ardianto 2011, Strategi Pembangunan, TIM YKPN, Yogyakarta.

Mardi Kamto, T.Soebiato, Purwoko, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Makmur, 2013. Teori Manajemen Stratejik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan, PT. Refika Aditama. Bandung.

Nitisastro, W,2010. Pengalaman Pembangunan Indonesia. kumpulan Tulisan dan Uraian widjoyo Nitisastro, Nawawi, Kompas, Jakarta.

Tarigan, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara.

Kay dan Alder, Rustiadi (2011:335) Perencanaan pembangunan, Rafika Aditama, Bandung.

Pratiwi, dan Soegijoko, Sugijanto, T.B dan Anwar, Choirul A,2011. Bunga Rampai.

Japan Ministry Of Internal Affairand Communication, 2013. Local Public Financial Bureau.

Mr. Takashi ONISHI Ph.D. *1998* , Japan Development Development Planning

Conyers, Diana, 1984, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Cetakanke-1 tahun 1991, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Mayer, Robert R, 1985, Policy and Program Planning, A Developmental Perspective,Prentice-Hall Inc, New Jersey.

Brinkerhoff, Derick W and Crosby, Benjamin L, 2002, Managing Policy Reform, Concepts and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning, cetakanke-1, Kumarian Press, Bloomfiled USA.

Http://www.soumu.go.jp/english/lpfb/index.html. [diakses 15 Januari 2014]

Kementerian Keuangan RI, 2014. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2014. Http://www.kemenkeu.go.id/Page/infografis-apbn-2014. [diakses 15 Januari 2014]